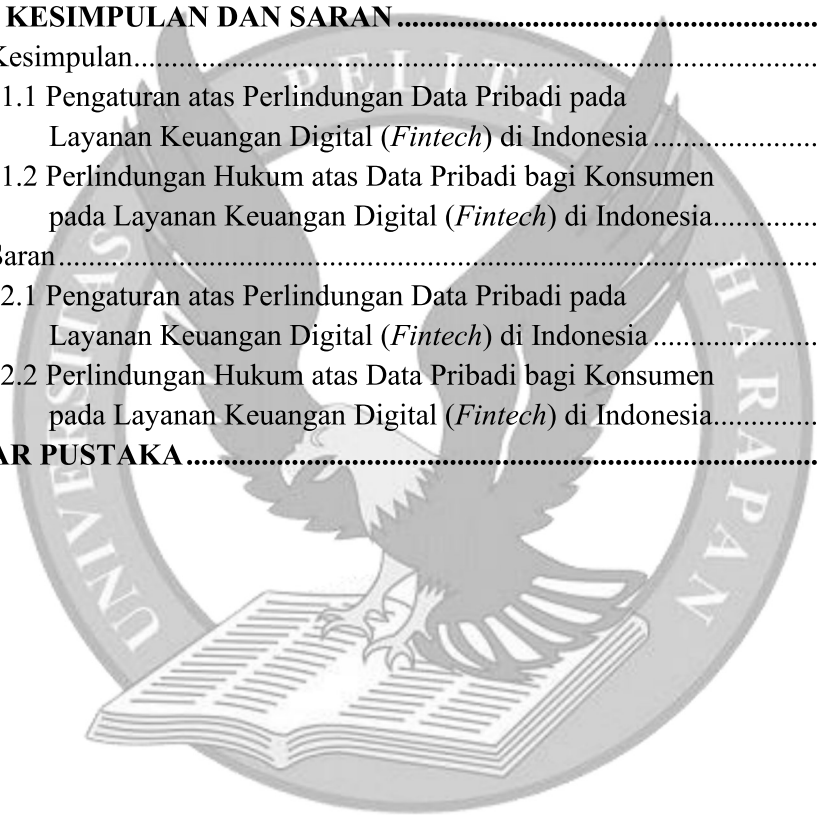


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN PENYERAHAN HAK NONEKSLUSIF TANPA ROYALTI DAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
1.4.1 Manfaat Teoritis	22
1.4.2 Manfaat Praktis	22
1.5 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Tinjauan Teori	24
2.1.1 Teori Hak Asasi Manusia	24
2.1.2 Teori Negara Hukum	28
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum	31
2.2 Tinjauan Konseptual	35
2.2.1 Hak atas Privasi	35
2.2.2 Pengertian Data Pribadi	41
2.2.3 Perlindungan Data Pribadi	43
2.2.4 <i>International Best Practices</i> tentang Perlindungan Data Pribadi	44
a. Perserikatan Bangsa-Bangsa	45
b. ASEAN	47
c. OECD.....	50
d. Uni Eropa	53

2.2.5 Layanan Keuangan Digital (<i>Fintech</i>) di Indonesia.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Jenis Data	59
3.3 Cara Perolehan Data.....	59
3.4 Jenis Pendekatan	60
3.5 Analisa Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	63
4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1 Karakteristik <i>Fintech</i>	63
4.1.2 Pertumbuhan <i>Fintech</i> di Indonesia.....	68
4.1.3 Kasus Kebocoran Data Pribadi.....	70
4.1.4 Peran Otoritas Jasa Keuangan	80
a. Pengawasan <i>Market Conduct</i>	83
b. Pengaturan Berbasis Prinsip dan <i>Light Touch Regulation</i>	84
c. <i>Safe Harbor Policy</i>	86
d. <i>Regulatory Sandbox</i>	88
4.2 Pengaturan atas Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Keuangan Digital.....	89
4.2.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	89
4.2.2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia	92
4.2.3 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen	97
4.2.4 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	98
4.2.4.1 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	99
4.2.4.2 Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.....	101
4.2.4.3 Peraturan Menteri Kominfo Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.....	104
4.2.5 Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.....	104
4.2.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	118
4.2.6.1 POJK mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.....	118
4.2.6.2 POJK mengenai <i>Peer-to-Peer Lending</i>	130
4.2.6.3 POJK mengenai Inovasi Keuangan Digital	133
4.2.6.4 POJK mengenai <i>Crowdfunding</i>	134
4.2.6.5 POJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh LJKNB.....	138
4.3 Perlindungan Hukum atas Data Pribadi bagi Konsumen pada Layanan Keuangan Digital (<i>Fintech</i>) di Indonesia	141

4.3.1 Perlindungan Hukum Eksternal dan Internal	141
4.3.1.1. Perlindungan Hukum Eksternal – Regulasi.....	142
4.3.1.2. Perlindungan Hukum Internal – Perjanjian Baku.....	143
4.3.2 Infrastruktur.....	147
4.3.2.1 Asosiasi sebagai <i>Self-Regulatory Organization</i>	147
4.3.2.2 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).....	152
4.3.2.3 Program OJK.....	153
4.3.2.4 Koordinasi dengan Kementerian Lainnya	154
4.3.3 Edukasi/Literasi kepada Publik.....	155
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	160
5.1 Kesimpulan.....	160
5.1.1 Pengaturan atas Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Keuangan Digital (<i>Fintech</i>) di Indonesia	160
5.1.2 Perlindungan Hukum atas Data Pribadi bagi Konsumen pada Layanan Keuangan Digital (<i>Fintech</i>) di Indonesia.....	162
5.2 Saran.....	163
5.2.1 Pengaturan atas Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Keuangan Digital (<i>Fintech</i>) di Indonesia	163
5.2.2 Perlindungan Hukum atas Data Pribadi bagi Konsumen pada Layanan Keuangan Digital (<i>Fintech</i>) di Indonesia.....	164
DAFTAR PUSTAKA.....	166



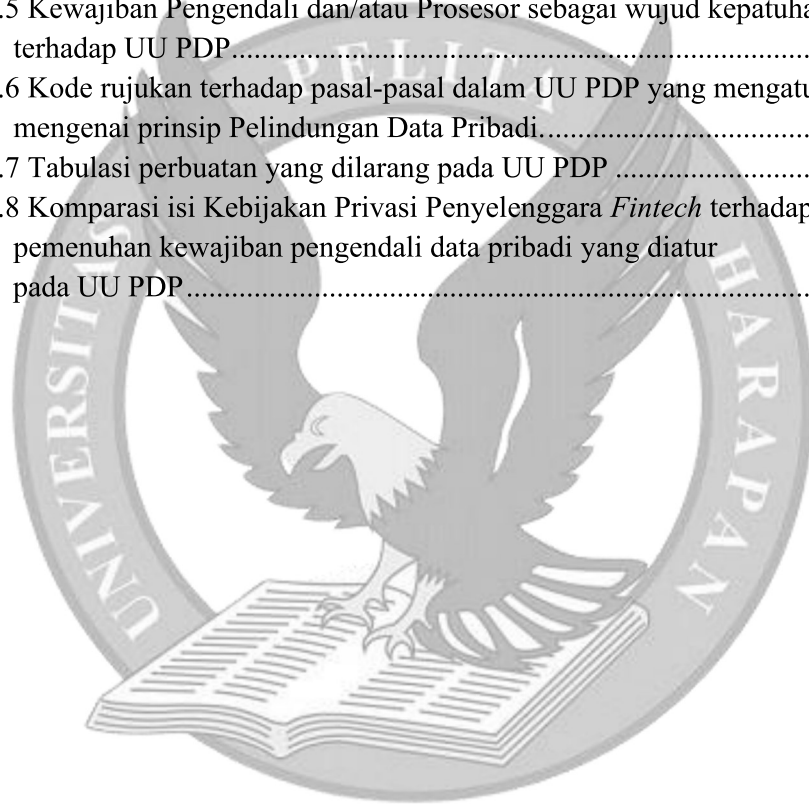
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 <i>Screenshot</i> Pesan Singkat Penawaran Jasa	76
Gambar 4.2 <i>Screenshot</i> Pesan Singkat Penawaran Hadiah.....	77
Gambar 4.3 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Tahun 2013-2019	158
Gambar 4.4 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Tahun 2013-2022	158



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pertumbuhan <i>Fintech</i> 2017-2021	68
Tabel 4.2 Perbandingan UUD 1945 dengan UU HAM	94
Tabel 4.3 Kewajiban Pengendali dan/atau Prosesor yang bersumber pada hak Subjek Data Pribadi	113
Tabel 4.4 Kode rujukan terhadap pasal-pasal dalam UU PDP yang mengatur mengenai hak Subjek Data Pribadi	114
Tabel 4.5 Kewajiban Pengendali dan/atau Prosesor sebagai wujud kepatuhan terhadap UU PDP.....	115
Tabel 4.6 Kode rujukan terhadap pasal-pasal dalam UU PDP yang mengatur mengenai prinsip Pelindungan Data Pribadi.....	116
Tabel 4.7 Tabulasi perbuatan yang dilarang pada UU PDP	117
Tabel 4.8 Komparasi isi Kebijakan Privasi Penyelenggara <i>Fintech</i> terhadap pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi yang diatur pada UU PDP.....	154



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil <i>Screenshot</i> Indikasi Kebocoran Data Pribadi.....	178
Lampiran 2 Salinan Kebijakan Privasi	180
1. Salinan Kebijakan Privasi Ringan.id.....	180
2. Salinan Kebijakan Privasi Kredivo.id	190
3. Salinan Kebijakan Privasi Koinworks.com	196
Lampiran 3 Hasil <i>Turnitin</i>	210



DAFTAR SINGKATAN

AFTECH	: Asosiasi Fintech Indonesia.
AFPI	: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
ALUDI	: Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia.
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
Aptika	: Aplikasi Informatika
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
BTS	: Base Transceiver Station.
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
EGDI	: <i>e-Government Development Index</i>
ELSAM	: Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
GDPR	: <i>General Data Protection Regulation</i>
GESIT	: Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IKD	: Inovasi Keuangan Digital
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKI	: Komunitas Konsumen Indonesia
Kode Etik PDP	: Kode Etik terkait Pelindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Data di Sektor Teknologi Finansial yang ditetapkan oleh AFTECH.
Kominfo	: Komunikasi dan Informatika
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUH Perdata	: Kitab Hukum Undang-Undang Perdata
LAKU PANDAI	: Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
LAPS-SJK	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan.
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OJK <i>Infinity</i>	: OJK <i>Innovation Centre for Digital Financial Technology</i> (Pusat Inovasi Keuangan Digital OJK)
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto

Permen Kominfo PDP-SE	: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Permen Kominfo PSP Lingkup Privat	: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
PerPres SNKI 2016	: Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
PP PSTE	: Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
POJK 4/2021	: Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
POJK Crowdfunding 2018	: Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>).
POJK IKD	: Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
POJK P2P 2016	: Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
POJK P2P 2022	: Peraturan OJK No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
POJK Perlindungan Konsumen	Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
RPJMN 2020-2024	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

SEOJK 13/2014	Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Perjanjian Baku
SE-OJK Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD.	: Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
SNKI	: Strategi Nasional Keuangan Inklusif
SNLIK	: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau <i>eGovernment</i>
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UN HRC	: <i>United Nations Human Rights Committee / Komite HAM PBB</i>
UUD 1945	: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diamandemen terakhir di tahun 2002
UU ITE	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik
UU HAM	: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU OJK	: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
UU PDP	: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
UU Perlindungan Konsumen	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen